

PENDIDIKAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Wacana Penerapan Kurikulum Ekonomi Islam

Oleh : Syarif As'ad

Pendahuluan

Pada masa awal perubahan Islam (1900-1908) Menurut Muhammad Yunus (1979) bahwa isi pendidikan Islam masih berpandangan bahwa hakikat manusia adalah sebagai 'abd Allah yang senantiasa mengadakan hubungan vertical dengan Allah guna mencapai kesalehandan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak, sehingga dalam merealisasikan hubungan tersebut diperlukan pembelajaran atau pendidikan Islam¹ yang didalamnya termasuk Pendidikan Ekonomi Islam memang masih didominasi pada penekanan *Given Perennial Knowledge*, yaitu pengetahuan abadi yang diwahyukan, yang berdasar pada wahyu Ilahi yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dan semua pengetahuan yang berasal dari keduanya dengan penekanan pada bahasa arab sebagai kunci untuk memahami keduanya. Sedangkan "*Acquired knowledge*" (pengetahuan yang diperoleh) tidak diberikan sama sekali.²

Oleh Wijosukarto (1985) sebutan pendidikan *corak lama* ini sengaja dipisahkan karena kemudian muncul pendidikan *corak baru* dari perguruan (sekolah-sekolah) yang dihadirkan kolonial Belanda dengan konsep khas barat yaitu ingin melahirkan golongan intelek dan menghadang perkembangan corak lama.³ Perpecahan dan

¹ Isi pendidikan Islam pada masa perubahan (1900-1908) sebagai mana yang dikemukakan Muhammad Yunus (1979) meliputi: (1) Pengajian Al-Qur'an; (2) Pengajian Kitab yagn terdiri atas beberapa tingkat, yaitu (a) mengaji nahwu, sharaf dan fiqh dengan memaki kitab Ajrumiyah, matan Bina, Fathul Qorib dan sebagainya; (b) mengaji tauhid, nahwu, sharaf dan fiqh dengan memakai kitab Sanusi, Syaikh Khalid (azhari, 'Asymawi), Kailani, Fathul Mu'in dan sebagainya; dan (c) mengaji tauhid, nahwu, Sharaf, fiqh, tafsir dan lain-lain dengan memakai kitab-kitab kifayatul 'Awam (Ummul-Barahin), Ibnu 'Aqil, Mahalli, Jalalain/Baidlawi dan sebagainya. Muhaimin, Dr, MA dalam bukunya Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2004. hal. 72)

² Istilah ini di populerkan oleh Syed Ali Ashraf dalam bukunya *New Horizon In Muslim Education* (London; The Academy, Cambridge and Hodder and Stoughton, 1984) dan kemudian digunakan kembali oleh Muhaimin, Dr, MA, ibid. hal. 73)

³ Amir Hamzah Wirjosukerto, Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam (Jember: Muria Offset 1985) Wijosukarto memisahkan corak lama dan corak baru berdasarkan karakteristik

pemisahan ini menjadikan dua corak semakin berjauhan sehingga tidak menguntungkan bagi perkembangan masyarakat Indonesia mendatang bahkan merugikan umat muslim sendiri. Karena itu, perbedaan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi supaya tidak semakin tajam.

Hadirnya tokoh-tokoh pembaharu yang sangat *concern* dalam memperdalam agama dengan usahanya sendiri seperti Syekh H. Abdullah Ahmad (1878-1933 M) dan K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923 M) memunculkan gagasan baru dengan mencoba menghadirkan konsep yang ketiga dengan menggabungkan antara corak lama dengan corak baru, sehingga mampu mengakulturasi dua corak pendidikan yang saling bertentangan ini, dan ide yang dimunculkan adalah untuk melahirkan ulama-ulama (*inteligensia*) baru yang selain pandai dalam ilmu-ilmu agama juga memahami ilmu-ilmu umum, dari sini muncul gagasan *ulama-intelekt* dan *intelekt-agama*.⁴

Setelah berbagai Negara di dunia khususnya Negara-negara Eropa banyak mengembangkan pemikiran Ekonomi Islam, tidak kalah ketinggalan wilayah Asia tenggara khususnya Indonesia dan Malaysia ikut serta mendongkrak sektor pendidikan formal sebagai pijakan pengembangan popularitas Ekonomi Islam. Setelah usai konferensi Ekonomi Islam Internasional Pertama tahun 1976 di Mekkah dan Konferensi pertama ini dijadikan sebagai momentum awal kelahiran ilmu Ekonomi Islam modern.

Sejak tahun 1970-an tersebut kajian ilmiah dan riset tentang Ekonomi Islam yang bersifat empiris terus dilakukan dan disosialisasikan ke berbagai negara, sehingga gerakan akademis Ekonomi Islam makin berkembang. Sejak tahun 1990-an, studi Ekonomi Islam telah dikembangkan di berbagai universitas, baik di negeri-negeri Muslim (khususnya Asia; Pakistan, Iran, Malaysia dan Afrika/Mesir) maupun di negara-negara Barat, seperti di Eropa, Amerika Serikat dan Australia. Di Inggris terdapat beberapa universitas yang telah mengembangkan kajian Ekonomi Islam

yang berbeda, sehingga kedua corak pendidikan ini berdiri sendiri-sendiri bahkan cenderung bertentangan.

⁴ Ibid, hal. 47

(*Islamic Economics*), seperti University of Durham, University of Portsmouth, Markfield Institute of Higher Education, University of Wales Lampeter, dan Loughborough University. Di Amerika Serikat, sebuah universitas paling terkemuka di dunia, yaitu Harvard University, sangat aktif melakukan kajian Ekonomi Islam. Para pakar Ekonomi Islam di sana mengadakan Harvard Forum yang setiap tahun menggelar seminar dan workshop Ekonomi Islam. Di Australia, University of Wollongong juga melakukan hal yang sama. Di Malaysia, kajian akademis Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi telah dimulai sejak tahun 1983.⁵

Di Indonesia, kajian akademis Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi, baru marak sejak tahun 2000-an. IAIN Sumatera Utara merupakan Perguruan Tinggi paling awal dalam mengembangkan kajian Ekonomi Islam di Indonesia, yaitu dengan berdirinya Forum Kajian Ekonomi dan Bank Islam (FKEBI) pada tahun 1990. FKEBI dengan demikian, lahir sebelum berdirinya Bank Muamalat Indonesia di Jakarta tahun 1992. Tampilnya IAIN Sumatera Utara sebagai pelopor pertama gerakan akademis Ekonomi Islam, dikarenakan pengaruh kuat negara jiran Malaysia yang telah 20 tahun lebih mengembangkan kajian Ekonomi Islam di negaranya (Malaysia mulai mengembangkan Ekonomi Islam sejak tahun 1983).

Sejalan dengan maraknya perkembangan Perbankan Syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, maka tumbuh dan berkembang pulalah secara massif program pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia, sebagai respon terhadap maraknya lembaga – lembaga keuangan syariah. Dalam masa lima tahun (2000-2005) perkembangan perbankan dan asuransi syariah tumbuh secara fantastis. (pertengahan tahun 2007) jumlah Perbankan Syariah telah berjumlah 29 buah dengan jaringan kantor sebanyak 620an buah. Sementara Asuransi Syariah yang selama ini diperankan asuransi Takaful secara tunggal, kini telah lahir 36 lembaga asuransi syariah. Selain itu juga telah berkembang pula pasar modal syariah (reksadana syariah dan obligasi

⁵ Agustianto (Sekjen IAEI) dalam opini standarisasi kurikulum Ekonomi Islam.
www.hupelita.com

syariah), pegadaian syariah, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), Koperasi Syariah, lembaga Zakat, Waqaf dan sebagainya.

Tentunya dengan dukungan dan harapan tersebut semakin membuat kita berusaha memperbaiki diri, terutama berkaitan dengan tanggungjawab untuk merealisasikan pendidikan ekonomi syariah sampai tingkat pendidikan dasar. Karena bagaimanapun pendidikan bukan hanya proses transfer pengetahuan tetapi yang jauh lebih penting adalah proses internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas hidup, dan ini tentunya akan sangat efektif jika diterapkan semenjak pendidikan dasar. Selain itu, dalam pendidikan dasar dan menengah saat ini, pendidikan ekonomi masih didominasi oleh worldview dan muatan ideologi kapitalisme. Dan hal ini yang menjadi akar kerusakan yang dahsyat dalam perekonomian dan ini tentunya membutuhkan sebuah perubahan yang serius dan fundamental.

Antara Idealita dan Realita

Melihat pertumbuhan dunia Akademik yang konsen terhadap pengembangan ilmu Ekonomi Islam betul-betul diharapkan mampu untuk melahirkan dan memunculkan pakar-pakar ekonomi baru yang secara implisit memahami konsep-konsep ekonomi dan sekaligus mendalami serta menguasai prinsip-prinsip agama secara mendalam. Pada tataran teoritis dan konseptual, kita masih merasakan sangat kekurangan pakar yang benar-benar mendalami sekaligus ilmu ushul fiqh, fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan. Figur seperti ini benar-benar langka bukan saja bagi masyarakat Islam di Indonesia melainkan juga di banyak negara termasuk negara lain yang perkembangan Ekonomi Islamnya cukup pesat. Kebanyakan adalah para pakar ekonomi yang fasih berbicara tentang ilmu ekonomi tetapi awam dalam ushul fiqh atau fiqh muamalah. Sebaliknya banyak pakar yang mahir dalam fiqh dan usul fiqh tetapi buta tentang ilmu ekonomi. Persoalan ini memang bukan hanya persoalan akademik yang pemecahannya harus melibatkan perubahan dalam pengembangan kurikulum dan silabi pengajaran Ekonomi Islam, akan tetapi juga

persoalan-persoalan birokrasi dan *political will*, termasuk di dalamnya sistem pendidikan yang ada.

Perencanaan yang matang pada awal perkembangan pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia sudah dilakukan, serta berangsur-angsur penyusunan metodologi terhadap Ekonomi Islam diperbaharui mengingat perkembangannya selalu dihadapkan pada permasalahan multi dimensi, pada satu sisi persoalan sosial budaya masyarakat masih masih terseok-seok untuk mengikuti aturan main perbankan di Indonesia disamping pemahaman yang labil, sementara di sisi lain pelaku (praktisi-akademisi) Ekonomi Islam mengejar keinginan yang secara praksis menanamkan “biji buah” dengan tergesa-gesa bahkan banyak kalangan yang dijadikan ujung tombak pada praktiknya tidak membekali diri dengan pemahaman yang cukup dan dikhawatirkan keluar dari konsep syariat Islam. Dampak yang cukup besar akhirnya dapat membayang-bayangi perkembangan Ekonomi Islam itu sendiri, alhasil masyarakat awam mendefinisikan sebagai sesuatu yang tidak ada bedanya dengan konsep-konsep konvensional yang ada. Hal ini seharusnya diimbangi dengan berbagai upaya strategis guna memberikan *linear support* terhadap pemahaman yang sederhana, *direct marketing concept* yang disuguhkan harus terencana dan terarah dengan memperhatikan kapasitas sumber daya manusianya sebagai pendakwah agama yang dapat memahami bahwa dalam diri Muslim terdapat kewajiban menyebarkan *kalimatullah* di muka bumi ini.

Penerapan Standar Kurikulum Ekonomi Islam

Setelah memperhatikan pertumbuhan sendi-sendi Ekonomi Islam termasuk di dalamnya; Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah serta dukungan bidang Akademik yang sudah banyak mengembangkan berbagai bidang studi dan konsentrasi yang terkait dengan ilmu Ekonomi Islam, ini merupakan peluang besar dan tentunya kesempatan terbuka luas bagi pasar tenaga kerja untuk bersaing memasuki industri besar Perbankan Syariah.

Namun demikian masih banyak kendala yang harus dihadapi oleh para perintis usaha bidang syariah sekaligus dunia perbankan Islam ini, secara cermat mereka dituntut untuk menyeleksi sumber daya insani (SDI) yang memenuhi standar operasional Perbankan Syariah, yang betul-betul menguasai konsep-konsep syariah yang telah diintegrasikan dengan aplikasi ilmu ekonomi atau sebaliknya. Perpaduan dua konsep ini masih jarang keduanya dikuasai oleh seseorang, artinya dalam hal ini keseriusan menciptakan calon-calon pakar dalam bidang Perbankan Syariah khususnya dan pada Ekonomi Islam pada umumnya harus melalui sebuah kurikulum Ekonomi Islam berbasis kompetensi yang dinamis yang menjadi acuan secara nasional, sehingga apa yang diharapkan oleh pasar tenaga kerja dapat terpenuhi. Upaya ini juga telah dirintis oleh pakar-pakar Ekonomi Islam yang tergabung dalam Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dalam simposium kurikulum nasional Ekonomi Islam yang bertujuan (i) Mengkaji Kurikulum yang dimiliki beberapa Perguruan Tinggi (PT) dengan cara melakukan studi komparatif dan analisis terhadap isi kurikulum. (ii) Melakukan penyamaan persepsi tentang kurikulum Ekonomi Islam yang dibutuhkan. (iii) Mencari dan membentuk kurikulum Ekonomi Islam berbasis kompetensi yang dinamis yang menjadi acuan secara nasional. Hal ini dilakukan karena banyaknya upaya pengembangan Program Studi atau konsentrasi Ekonomi Islam secara terpisah (masing-masing) oleh seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia menimbulkan perbedaan kurikulum yang diajarkan, padahal konsentrasinya atau prodinya sama, misalnya sama-sama Perbankan Syariah atau sama-sama program Ekonomi Islam di Strata dua (S2). Jadi dalam hal ini belum ada kurikulum standar yang menjadi acuan bersama. Diduga keras bahwa penyusunan kurikulum Ekonomi Islam oleh masing-masing Perguruan Tinggi secara sendiri-sendiri dilakukan berdasarkan latar belakang akademik para pengajarnya semata. Celaknya lagi, kurikulum tersebut kadang disusun oleh yang bukan ahlinya. Misalnya disusun oleh ahli pendidikan atau ahli ilmu sosial atau pemikiran Islam. Mereka sama sekali tidak mengetahui memahami Ekonomi Islam. Kalau pun disusun oleh dosen yang bergelar sarjana ekonomi, program studi yang dibuat kurang diimbangi dengan penelitian dan

analisis tentang kebutuhan kompetensi baik dari sudut perkembangan Ilmu Ekonomi maupun kebutuhan dari institusi ekonomi keuangan Ekonomi Islam terhadap lulusan Perguruan Tinggi.

Salah satu aspek yang cukup mendasar adalah penerapan kurikulum pada sekolah menengah, baik pada tingkatan menengah pertama (SMP) atau tingkatan menengah atas (SMA-sederajat) merupakan salah satu alternative yang pada akhir-akhir ini sedang disosialisasikan di beberapa daerah, sehingga kesiapan para siswa dalam mendalami ilmu Ekonomi Islam pada Perguruan Tinggi lebih intensif dan jauh lebih matang. Disamping pendekatan secara intensif kepada kalangan pendidikan itu sendiri.

Saat ini kita tertinggal dari Malaysia, dimana pelajaran ekonomi syariah disana sudah diajarkan sejak kelas 1 SMU sejak lebih dari 20 tahun lalu. Dan kurikulumnya terus dikembangkan sesuai perkembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah menjadi bagian dari pelajaran ekonomi umum dan karena itu yang mengaturnya departemen pendidikan dan bukan departemen agama. Malaysia memiliki tujuan agar ekonomi syariah diajarkan di seluruh sekolah, negeri dan swasta dan dipelajari semua siswa, Muslim dan non-Muslim. Dengan demikian ekonomi syariah masuk ke dalam kurikulum nasional tidak sekedar muatan lokal.

Malaysia benar-benar berusaha mengembangkan diri menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah. Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah membekali pelajar sekolah menengah umum dengan ilmu ekonomi Islam. Dengan cara ini diharapkan, kesadaran dan pengetahuan ekonomi Islam tumbuh sejak dini.⁶

Peran Pemerintah

⁶ langkah paling fundamental adalah membenahi pembentukan SDI dengan menghilangkan pengaruh kesalahan dan kerusakan ilmu ekonomi yang diajarkan, ditanamkan serta membentuk perilaku ekonomi individu sejak kecil. dominasi pengajaran ilmu ekonomi di pendidikan dasar kita adalah warisan pencerahan Eropa dan dikembangkan dari filsafat barat yang bermuatan ideologi kapitalisme. Dan sebagaimana telah disadari oleh pengkaji teori ilmu-ilmu sosial, filsafat barat dan ideologi kapitalisme memiliki cacat bawaan, mengidap "retakan epistemologis (epistemological rupture)", sehingga tidak bisa menjadi landasan dalam membangun ilmu sosial yang kokoh.

Pemerintah (BI) merupakan pendongkrak utama pada standar regulasi internasional pada Perbankan Syariah pada aspek ketentuan hukum perbankan, sementara dalam hal pendidikan Ekonomi Islam adalah Diknas dan Depag yang sampai sekarang (awal 2008) masih terus mengkaji tentang penerapan kurikulum ekonomi syariah kita anggap sebagai harapan yang cukup besar sekaligus sebagai peluang bagi pertumbuhan Ekonomi Islam yang akhirnya dapat dijadikan sebagai pendorong utama dalam mensukseskan penerapan kurikulum Ekonomi Islam pada sekolah maupun di Perguruan Tinggi, dikarenakan system yang lebih terintegrasi terutama jika ditetapkan oleh pemerintah akan mampu teraplikasikan secara menyeluruh. Dewasa ini keterkaitan dengan pendidikan Ekonomi Islam, Pemerintah juga telah kita lihat berusaha mengembangkan Perbankan Syariah. Pemerintah mengharapkan sistem Perbankan Syariah sebagai bagian dari sistem Ekonomi Nasional yang dapat merespon agenda nasional.

Mengingat pentingnya pembangunan ekonomi syariah, pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya bagi pengembangan sistem ekonomi syariah dengan melakukan perubahan Undang-Undang No 7/1992 tentang Perbankan menjadi UU No 10/1998. Undang-undang ini mengatur pranata hukum bagi keberadaan bank syariah di Indonesia. Berdasarkan UU ini pula, bank umum konvensional diperbolehkan berusaha dengan prinsip syariah melalui pembukaan Unit Usaha Syariah. Pada 1999 pemerintah mengeluarkan UU No 23/1999 yang kemudian diamendemen dengan UU No 3/2004 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada BI untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah.

Dalam mempercepat pertumbuhan Perbankan Syariah, keberadaan UU Perbankan Syariah mutlak diperlukan. Untuk mewujudkannya, pemerintah dengan DPR tengah menyelesaikan RUU tersebut. Hingga kini pembahasan RUU Perbankan Syariah masih menyisakan beberapa pasal krusial. Adapun pasal-pasal krusial itu antara lain pasal berkenaan dengan 1) keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), 2) keberadaan Unit Usaha Syariah (UUS), 3) masalah perizinan, 4) lembaga

penyelesaian sengketa, 5) kepemilikan asing, 6) kewenangan penyidikan, dan 7) lembaga yang berwenang menetapkan fatwa.⁷ Sorotan utama mengenai persoalan krusial ini adalah sebagai pertimbangan mengapa kurikulum harus segera diwujudkan serta penerapannya diatur secara kredibel oleh pemerintah

Pertumbuhan Perbankan Syariah yang didukung adanya standarisasi kurikulum Ekonomi Islam yang telah disahkan oleh pemerintah, kita yakin sektor ini selain dalam jangka panjang memiliki keterkaitan dengan peningkatan standar regulasi internasional Perbankan Syariah dan akan mendongkrak sektor ekonomi nasional, selanjutnya diharapkan dapat membawa *multiplier effect* dalam perekonomian nasional dan selama ini Perbankan Syariah telah teruji kemampuannya dalam menciptakan stabilitas ekonomi bangsa secara menyeluruh (optimis)

Penutup

Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Aziz Setiawan, secara bersama-sama harus dilakukan upaya sistematis dan terencana untuk melakukan pembenahan dalam sistem dan kurikulum pendidikan ekonomi dengan upaya upaya sebagai berikut:

Pertama, memperbanyak upaya kepeloporan pendidikan ekonomi syariah dari sekolah dasar dan menengah milik Ormas Islam. Banyak Ormas Islam yang memiliki lembaga pendidikan yang jumlahnya ribuan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama', Hidayatullah, Persis, dll. Tentu upaya kepeloporan dapat dimulai dari ribuan sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Ormas Islam tersebut untuk mulai mengkaji dan merealisasikan kurikulum ekonomi syariah. Langkah ini tentu akan lebih mudah, baik melalui kurikulum lokal maupun memasukkan dalam muatan pengajaran baik untuk sekolah umum, madrasah, pesantren, maupun SDIT-nya. Tentu saja hal ini membutuhkan kepedulian, keberpihakan dan pengorbanan para tokoh, pimpinan, guru-guru untuk bersama-sama mengkaji kembali kanzah ekonomi Islam yang

⁷ Makmun. (Peneliti Utama Bidang Pengelolaan Risiko Fiskal Depkeu) dalam Tantangan Perbankan Syariah. www.republika.co.id.

sangat kaya ini. Buku-buku rujukan tentang Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Mikro Ekonomi Islam, dan Makro Ekonomi Islam yang sudah banyak beredar bisa dijadikan rujukan awal.

Kedua, melakukan reformasi kurikulum ekonomi di Depag dan Depdiknas. Sebagaimana dipahami bahwa dua induk regulasi pendidikan kita ada di dua lembaga ini, untuk madrasah-madrasah ada di Depag dan sekolah-sekolah umum ada di Diknas. Seluruh muatan kurikulum nasional diatur oleh lembaga ini. Oleh karena itu harus terus didorong agar ekonomi syariah baik secara formal maupun substantif masuk dalam muatan kurikulum. Keberhasilan Malaysia perlu dicontoh, tentu saja dengan perbaikan yang fundamental. Kita telah mengalami kemajuan yang cukup berarti untuk kurikulum ekonomi syariah bagi pendidikan tinggi (PT) di Depag, dan di Dikti sudah dibolehkan masuk minimal pada mata kuliah pilihan. Tetapi belum ada perkembangan sama sekali untuk kurikulum di pendidikan dasar dan menengah, dan ini harus menjadi perhatian semua pihak. Karena pendidikan dasar dan menengah adalah masa emas pembentukan kepribadian yang paling efektif.

Ketiga, menyediakan buku-buku panduan pengajaran dan pendukungnya. Hal ini tentu saja perlu kebijakan keberpihakan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pendanaan pengembangan studi ekonomi syariah. Kita perlu mencontoh Malaysia yang setiap tahun pemerintahnya menyediakan 200 juta ringgit (sekitar Rp 500 milyar) khusus untuk pengembangan ekonomi Islam.

Keempat, mengoptimalkan potensi keunggulan fasilitas dan program belajar di Sekolah Islam-Terpadu (SD-IT/SMPIT/ SMA-IT) maupun Pesantren Modern yang juga sudah mengembangkan penguasaan bahasa Arab dan Inggris. Karena perkembangan literatur ekonomi syariah yang paling banyak saat ini adalah dalam dua bahasa ini. Dengan demikian model-model lembaga pendidikan unggulan ini diharapkan dapat menjadi syaitaroh (mercusuar) penyiapan SDI unggulan yang diharapkan nantinya akan melanjutkan pada PT dan mengambil jurusan ekonomi syariah. Sehingga kedepan mereka akan menjadi tokoh-tokoh ekonomi Islam baik sebagai praktisi, birokrat, akademisi, maupun entrepreneur yang handal. Selain itu

ketersediaan referensi, perpustakaan yang lengkap dan akses internet bisa mempermudah proses pembelajaran baik untuk guru maupun santri.

Kelima, pengembangan kurikulum ekonomi syariah harus terus dilakukan. Karena bagaimanapun, pengembangan ekonomi Islam sangat berkaitan dengan upaya mempertahankan warisan ilmu keislaman dan disisi lain berhadapan dengan pengaruh dari perkembangan ilmu ekonomi modern. Dan proses pemantapan ekonomi Islam untuk menjadi disiplin ilmu dan diakui keilmiahannya terus berlangsung. Selain itu perkembangan institusi ekonomi syariah juga terus mengalami perkembangan. Dengan demikian kurikulum ekonomi syariah diharapkan mampu merespon perkembangan sehingga akan menjadi kurikulum yang menarik dan dinamis. Selain itu kurikulum tersebut haruslah bersifat integratif, dimana aspek kognitif, afektif, dan psiko-motorik dapat berjalan dengan harmonis dan memberdayakan peserta didik.⁸

Wallahu a'lam bi al-shawab.

⁸ Ditulis oleh Abdul Aziz Setiawan., Kurikulum Ekonomi Syariah untuk Pendidikan Dasar dan Menengah pada Majalah Hidayatullah edisi Agustus 2006.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Hamzah Wirjosukerto., *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam*
Jember, Muria Offset.1985

Abdul Aziz Setiawan., *Kurikulum Ekonomi Syariah untuk Pendidikan Dasar dan*
Menengah, Hidayatullah Majalah, edisi Agustus 2006.

Muhaimin., *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
2004

www.hupelita.com

www.republika.co.id.

www.sebi.ac.id